

ABSTRAK

BATAS KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHI) TERHADAP TUNTUTAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DALAM GUGATAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

Oleh

NOVALITA BR SIBORO

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) membatasi kewenangan absolut PHI hanya pada empat jenis perselisihan yaitu, perselisihan kepentingan, perselisihan hak, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan perselisihan antar pekerja atau serikat pekerja. Namun pada praktiknya, dalam hal pengajuan gugatan masih terdapat adanya kumulasi gugatan PHK yang dalam hal tuntutanannya mengandung tuntutan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Penelitian ini menganalisis batas kompetensi absolut PHI dalam memeriksa dan memutus tuntutan PMH yang terdapat dalam gugatan PHK berdasarkan hukum positif Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif. Metode pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi dokumen. Teknik pengelolaan data dilakukan dengan pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data dan sistematika data.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kedudukan tuntutan PMH dalam gugatan PHK telah mengalami perubahan setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018. SEMA ini memberikan landasan bagi PHI untuk memeriksa dan memutus tuntutan PMH sepanjang perbuatan tersebut timbul dari hubungan kerja sehingga gugatan PHK yang memuat dalil PMH tidak serta merta membuat gugatan tersebut kabur. Penggabungan tuntutan ini memberikan akibat hukum, yaitu meningkatkan efisiensi peradilan dengan mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta memperluas akses keadilan bagi pekerja untuk memperoleh ganti rugi yang komprehensif, termasuk kerugian materiil.

Kata Kunci: Kompetensi Absolut, Pengadilan Hubungan Industrial, Perbuatan Melawan Hukum, Pemutusan Hubungan Kerja.

ABSTRACT

THE ABSOLUTE COMPETENCE LIMITS OF THE INDUSTRIAL RELATIONS COURT AGAINST THE CLAIM OF UNLAWFUL ACT IN A LAWSUIT FOR TERMINATION OF EMPLOYMENT

By

NOVALITA BR SIBORO

The Industrial Relations Court (IRC) based on Article 56 of Law Number 2 of 2004 concerning Industrial Relations Dispute Settlement limits IRC's absolute authority to only four types of disputes, namely, conflicts of interest, rights disputes, termination of employment and disputes between workers or labor unions. However, in practice, in terms of filing a lawsuit, there is still a accumulation of layoff lawsuits which in terms of the demands contain claims of unlawful acts. This study analyzes the absolute competence limits of IRC in examining and deciding unlawful acts demands contained in layoff lawsuits based on Indonesian positive law.

This type of research is normative legal research with a descriptive research type. The research approach uses a legislative approach and a case approach. The data used are secondary data and then analyzed qualitatively. Data collection methods with literature studies and document studies. Data management techniques are carried out by data examination, data tagging, data reconstruction and data systematics.

The results of the research and discussion show that the position of unlawful acts's demands in layoff lawsuits has changed after the issuance of the Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2018. That's provides a basis for IRC to examine and decide unlawful acts's claims as long as the act arises from the employment relationship so that a layoff lawsuit that contains unlawful acts's argument does not necessarily make the lawsuit escape. The merger of these demands has legal consequences, namely improving judicial efficiency by realizing the principles of fast, simple, and low-cost justice, as well as expanding access to justice for workers to obtain comprehensive compensation, including immaterial damages.

Keywords: Absolute Competence, Industrial Relations Court, Unlawful Act, Termination of Employment.